



Strategi KPU Minahasa untuk Melancarkan Pemilu Tahun 2024

Zidan Dondo¹, Romi Mesra²

^{1, 2} Universitas Negeri Manado

Email: 120402059@unima.ac.id, romimersa@unima.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received January 8, 2025
 Accepted February 15, 2025
 Published March 31, 2026

Kata Kunci:

Strategi KPU,
 Penyelenggaraan Pemilu,
 Partisipasi Pemilih



Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi kelembagaan yang diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa dalam melancarkan Pemilu Tahun 2024, khususnya dalam menghadapi tantangan geografis, sosial, dan politik yang khas di wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara semi-terstruktur bersama Ketua KPU Kabupaten Minahasa dan staf terkait, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Minahasa menerapkan tiga strategi utama, yaitu sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis komunitas, koordinasi kelembagaan berjenjang dan manajemen logistik, serta penguatan sumber daya manusia disertai respons terhadap dinamika politik lokal. Strategi-strategi tersebut menunjukkan adanya upaya adaptif secara kelembagaan, meskipun efektivitasnya belum merata terutama di wilayah dengan akses geografis yang terbatas. Temuan ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai strategi kelembagaan di tingkat kabupaten, tidak hanya terbatas pada aspek sosialisasi pemilih semata.

Abstract

This study aims to examine the institutional strategies implemented by the General Elections Commission (KPU) of Minahasa Regency in facilitating the 2024 General Election, particularly in dealing with geographic, social, and political challenges unique to the region. The study employs a qualitative approach, with data collected through observation and semi-structured interviews with the Chairman of KPU Minahasa Regency and related staff, analyzed using the interactive model of Miles and Huberman. The results reveal that KPU Minahasa applies three main strategies: community-based voter education and socialization, tiered institutional coordination and logistics management, and human resource strengthening alongside responsiveness to local political dynamics. These strategies demonstrate adaptive institutional efforts, although their effectiveness remains uneven in geographically remote areas. The findings contribute to a more comprehensive understanding of institutional strategy at the regency level beyond voter socialization alone.

Keywords: *KPU Strategy, Election Management, Voter Participation*

1. Pendahuluan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor

15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Dalam menjalankan tugasnya, KPU berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. KPU Kabupaten/Kota, termasuk KPU Kabupaten Minahasa, merupakan perpanjangan tangan KPU pusat yang bertanggung jawab menyelenggarakan tahapan pemilu di wilayah kerjanya masing-masing, mulai dari perencanaan program dan anggaran, pemutakhiran data pemilih, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, hingga penetapan hasil pemilu, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kabupaten Minahasa memiliki dinamika tersendiri mengingat kompleksitas sosial, geografis, dan politik yang melekat pada daerah tersebut. Ketua KPU Kabupaten Minahasa, Rendy V. J. Suawa, menekankan bahwa dinamika demokrasi lokal di Minahasa menuntut strategi kelembagaan yang adaptif agar seluruh tahapan pemilu dapat berjalan lancar, jujur, dan berintegritas. Kondisi ini sejalan dengan temuan Hermawan (2019) yang menyatakan bahwa strategi penyelenggara pemilu sangat menentukan tingkat partisipasi dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di tingkat lokal. Selain itu, Nugroho (2019) menegaskan bahwa strategi kelembagaan KPU, termasuk koordinasi antar divisi dan sekretariat, menjadi faktor penentu kelancaran penyelenggaraan pemilu di daerah.

Karakteristik sosial budaya masyarakat Minahasa turut menjadi faktor penting yang perlu dipahami dalam merumuskan strategi kelembagaan penyelenggara pemilu di wilayah ini. Pangalila, Mesra, dan Supit (2024) mengungkapkan bahwa masyarakat Sulawesi Utara, termasuk Minahasa, memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang kuat, yaitu *Si Tou Timou Tumou Tou*, *Mapalus*, dan *Torang Samua Basudara*, yang masing-masing mencerminkan semangat memanusiaikan sesama, kerja sama gotong royong, dan persaudaraan lintas suku maupun agama. Nilai-nilai tersebut telah terbukti berperan dalam menjaga harmoni sosial dan mencegah konflik antarkelompok di wilayah Sulawesi Utara. Dalam konteks penyelenggaraan Pemilu 2024, keberadaan nilai-nilai budaya ini menjadi modal sosial yang dapat dimanfaatkan KPU Kabupaten Minahasa untuk membangun kepercayaan publik, memperkuat partisipasi masyarakat, serta meredam potensi gesekan politik lokal melalui pendekatan yang selaras dengan kearifan budaya setempat, bukan semata-mata melalui strategi sosialisasi yang bersifat umum dan seragam.

Berbagai tantangan seperti rendahnya partisipasi pemilih pemula, luasnya wilayah kerja, keterbatasan sumber daya, serta dinamika sosial politik lokal menuntut KPU Kabupaten Minahasa untuk merumuskan strategi yang tepat sasaran. Rahman (2022) menemukan bahwa literasi politik masyarakat yang masih rendah berkontribusi terhadap lemahnya partisipasi dalam pemilu, sehingga penyelenggara pemilu dituntut untuk merancang program sosialisasi dan pendidikan pemilih secara berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian mengenai strategi KPU di Kabupaten Minahasa dalam melancarkan Pemilu Tahun 2024 menjadi penting untuk mengidentifikasi langkah-langkah konkret yang telah dan perlu dilakukan guna menjamin kualitas demokrasi di tingkat lokal.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan tema ini antara lain dilakukan oleh Haryono (2019) yang mengkaji strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda, dengan hasil menunjukkan bahwa sosialisasi berbasis komunitas dan pendekatan personal kepada tokoh masyarakat efektif meningkatkan partisipasi pemilih. Penelitian lain oleh Zulkarnain, Septia, Robing, dan Ansyari (2023) yang

berfokus pada peran kelembagaan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula menemukan bahwa pendidikan pemilih yang menyasar generasi muda menjadi strategi utama menjelang Pemilu 2024, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi kendala keterbatasan jangkauan sosialisasi.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Rube'i, Azwar, dan Firmansyah (2023) mengenai peran KPU dalam melaksanakan fungsi sosialisasi politik untuk pemilih pemula di Kota Pontianak menunjukkan bahwa kolaborasi dengan pihak sekolah dan komunitas pemuda mampu meningkatkan pemahaman politik pemilih pemula, meskipun efektivitasnya masih terbatas pada daerah perkotaan. Ketiga penelitian tersebut secara umum menunjukkan bahwa strategi KPU dalam melancarkan pemilu banyak berfokus pada aspek sosialisasi dan pendidikan pemilih, namun belum banyak mengungkap strategi kelembagaan secara menyeluruh yang mencakup koordinasi internal, manajemen logistik, dan penguatan sumber daya manusia penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten, khususnya di wilayah dengan karakteristik sosial budaya seperti Kabupaten Minahasa.

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian terdahulu, tampak bahwa kajian mengenai strategi KPU dalam melancarkan pemilu sebagian besar terfokus pada peningkatan partisipasi pemilih dan sosialisasi politik, sementara aspek strategi kelembagaan yang lebih luas, seperti manajemen tahapan pemilu, koordinasi antar sekretariat, dan penguatan kapasitas penyelenggara, belum banyak dikaji secara mendalam. Penelitian oleh Haryono (2019) dan Zulkarnain dkk. (2023) misalnya, lebih menitikberatkan pada strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih, sedangkan penelitian Rube'i dkk. (2023) berfokus pada pemilih pemula di wilayah perkotaan yang memiliki karakteristik berbeda dengan wilayah semi-rural seperti Kabupaten Minahasa.

Selain itu, penelitian-penelitian tersebut umumnya dilakukan di wilayah dengan konteks geografis dan sosial budaya yang berbeda dari Kabupaten Minahasa, sehingga strategi yang efektif di satu daerah belum tentu relevan diterapkan di daerah lain. Kekosongan kajian mengenai strategi KPU Kabupaten Minahasa secara spesifik dalam menghadapi Pemilu 2024, yang mencakup dinamika demokrasi lokal sebagaimana disampaikan oleh Rendy V. J. Suawa selaku Ketua KPU Kabupaten Minahasa, menunjukkan adanya celah penelitian yang perlu diisi. Hal ini menjadikan penelitian tentang strategi KPU di Kabupaten Minahasa sebagai kajian yang belum banyak tersentuh oleh penelitian sebelumnya.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokus kajian yang secara khusus mengangkat strategi kelembagaan KPU Kabupaten Minahasa dalam melancarkan seluruh tahapan Pemilu Tahun 2024, tidak hanya terbatas pada aspek sosialisasi dan pendidikan pemilih sebagaimana banyak dikaji pada penelitian terdahulu, melainkan juga mencakup koordinasi internal lembaga, manajemen logistik, serta respons terhadap dinamika politik lokal yang khas di wilayah Minahasa. Penelitian ini juga menghadirkan perspektif langsung dari pimpinan KPU Kabupaten Minahasa mengenai dinamika demokrasi di wilayah tersebut, sehingga memberikan gambaran yang lebih kontekstual dibandingkan penelitian sejenis di daerah lain.

Selain itu, penelitian ini berupaya mengintegrasikan kerangka regulasi nasional, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, dengan realitas implementasi di tingkat kabupaten, sehingga dapat mengungkap kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik penyelenggaraan pemilu di lapangan. Dengan pendekatan ini,

penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi baru berupa model strategi kelembagaan yang lebih komprehensif dan aplikatif bagi penyelenggara pemilu di daerah dengan karakteristik serupa dengan Kabupaten Minahasa.

Secara realitas di lapangan, penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Minahasa menghadapi berbagai tantangan nyata, mulai dari kondisi geografis yang terdiri atas wilayah dataran dan pegunungan, keterbatasan sumber daya manusia penyelenggara di tingkat kecamatan dan desa, hingga dinamika politik lokal yang cukup kompleks. KPU Kabupaten Minahasa dituntut untuk tetap menjaga independensi dan netralitas di tengah tekanan berbagai kepentingan politik, sekaligus memastikan seluruh tahapan pemilu, mulai dari pemutakhiran data pemilih hingga penetapan hasil, berjalan sesuai dengan asas jujur dan adil sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Realitas lain yang dihadapi adalah tingkat partisipasi masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor sosial budaya lokal, sehingga strategi yang bersifat umum belum tentu efektif diterapkan tanpa penyesuaian dengan karakteristik masyarakat Minahasa. Koordinasi antara KPU Kabupaten dengan jajaran sekretariat, badan ad hoc di tingkat kecamatan dan desa, serta pemangku kepentingan lain seperti partai politik dan aparat keamanan, menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan pemilu. Kondisi inilah yang mendasari perlunya kajian mendalam mengenai strategi konkret yang diterapkan KPU Kabupaten Minahasa agar Pemilu Tahun 2024 dapat berjalan lancar, damai, dan berkualitas.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan kontekstual mengenai strategi KPU Kabupaten Minahasa dalam meluncurkan Pemilu Tahun 2024. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengungkap makna, proses, dan dinamika sosial yang tidak dapat dijelaskan secara memadai melalui pendekatan kuantitatif, terutama dalam mengkaji strategi kelembagaan yang bersifat situasional dan berbasis pengalaman langsung para pelaku di lapangan. Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci dalam mengumpulkan dan menganalisis data secara induktif. Pendekatan ini dipandang relevan untuk mengungkap strategi KPU Kabupaten Minahasa secara utuh, baik dari sisi kebijakan, implementasi teknis, maupun tantangan yang dihadapi di lapangan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua cara utama, yaitu observasi dan wawancara. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilu 2024 di lingkungan kerja KPU Kabupaten Minahasa, termasuk aktivitas sosialisasi, koordinasi antar divisi dan sekretariat, serta pengelolaan logistik pemilu. Moleong (2017) menyatakan bahwa observasi dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk memperoleh data yang bersifat faktual mengenai perilaku dan peristiwa sebagaimana adanya, sehingga dapat memperkuat dan mengonfirmasi data yang diperoleh melalui wawancara. Sementara itu, wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada informan kunci, yaitu Ketua KPU Kabupaten Minahasa, Rendy V. J. Suawa, serta beberapa komisioner dan staf sekretariat yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan tahapan pemilu, guna menggali

informasi mendalam mengenai strategi, kendala, dan langkah-langkah konkret yang telah dan sedang dijalankan.

Analisis data dalam penelitian ini mengikuti model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1994), yang meliputi tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah hasil observasi dan transkrip wawancara yang relevan dengan fokus penelitian, kemudian data disajikan secara sistematis dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan interpretasi. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara dari berbagai informan serta mengonfirmasikannya dengan hasil observasi lapangan dan dokumen resmi KPU, seperti Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 dan laporan tahapan pemilu, sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan validitasnya.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Strategi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Minahasa menempatkan sosialisasi dan pendidikan pemilih sebagai salah satu strategi utama dalam melancarkan Pemilu Tahun 2024, khususnya untuk menjangkau pemilih pemula dan masyarakat di wilayah pegunungan yang relatif sulit diakses. Berdasarkan hasil wawancara dengan Rendy V. J. Suawa selaku Ketua KPU Kabupaten Minahasa, disampaikan bahwa,

“...sosialisasi dilakukan melalui pendekatan berbasis komunitas dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah desa agar pesan mengenai pentingnya berpartisipasi dalam pemilu dapat diterima secara lebih personal oleh Masyarakat”.

Gambar 1. Sosialisasi KPU Minahasa dalam Kegiatan KKL Mahasiswa



Sumber: Data Primer

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Haryono (2019) yang menunjukkan bahwa sosialisasi berbasis komunitas dan pendekatan personal kepada tokoh masyarakat efektif dalam meningkatkan partisipasi pemilih.

Hasil observasi di lapangan turut memperkuat temuan wawancara tersebut, di mana peneliti mengamati sejumlah kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan KPU Kabupaten

Minahasa di beberapa kecamatan, antara lain berupa dialog interaktif dengan pemilih pemula di lingkungan sekolah menengah serta kegiatan simulasi pencoblosan yang melibatkan generasi muda. Kegiatan tersebut tampak dirancang secara partisipatif dan komunikatif, sehingga peserta terlihat antusias dan aktif bertanya mengenai tata cara pemilihan.

Kondisi ini menguatkan temuan Zulkarnain, Septia, Robing, dan Ansyari (2023) yang menegaskan bahwa pendidikan pemilih yang menasar generasi muda menjadi strategi utama menjelang Pemilu 2024, meskipun dalam praktiknya jangkauan sosialisasi masih menghadapi keterbatasan, terutama pada wilayah dengan akses geografis yang lebih sulit.

Selain sosialisasi tatap muka, hasil wawancara juga mengungkapkan bahwa KPU Kabupaten Minahasa memanfaatkan media sosial dan kerja sama dengan pihak sekolah sebagai saluran tambahan untuk memperluas jangkauan edukasi pemilih. Rendy V. J. Suawa menjelaskan bahwa,

“...kolaborasi dengan pihak sekolah dinilai penting karena mampu menjangkau pemilih pemula secara lebih terstruktur melalui program ekstrakurikuler maupun kegiatan kesiswaan”.

Hal ini sejalan dengan temuan Rube'i, Azwar, dan Firmansyah (2023) yang menunjukkan bahwa kolaborasi dengan pihak sekolah dan komunitas pemuda mampu meningkatkan pemahaman politik pemilih pemula. Namun demikian, hasil observasi menunjukkan bahwa efektivitas strategi ini masih lebih menonjol di wilayah perkotaan dan pusat kecamatan, sementara di desa-desa terpencil intensitas sosialisasi masih perlu ditingkatkan, sejalan dengan temuan Rahman (2022) mengenai rendahnya literasi politik masyarakat sebagai salah satu faktor penghambat partisipasi pemilih.

b. Strategi Koordinasi Kelembagaan dan Manajemen Logistik

Temuan penelitian menunjukkan bahwa koordinasi kelembagaan menjadi salah satu pilar penting dalam strategi KPU Kabupaten Minahasa untuk memastikan seluruh tahapan Pemilu 2024 berjalan lancar. Dalam wawancara, Ketua KPU Kabupaten Minahasa menyampaikan bahwa,

“...koordinasi dilakukan secara berjenjang, mulai dari internal antar divisi di tingkat kabupaten, dengan sekretariat, hingga dengan badan ad hoc seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa. Pola koordinasi berjenjang ini dinilai penting mengingat luasnya wilayah kerja serta kondisi geografis Kabupaten Minahasa yang terdiri atas dataran dan pegunungan”.

Temuan ini memperkuat pandangan Nugroho (2019) yang menegaskan bahwa strategi kelembagaan KPU, termasuk koordinasi antar divisi dan sekretariat, menjadi faktor penentu kelancaran penyelenggaraan pemilu di daerah.

Hasil observasi terhadap kegiatan rapat koordinasi di lingkungan KPU Kabupaten Minahasa menunjukkan adanya mekanisme rapat rutin yang melibatkan komisioner, sekretariat, dan perwakilan badan ad hoc untuk membahas perkembangan setiap tahapan pemilu, termasuk pemutakhiran data pemilih, distribusi logistik, dan kesiapan tempat pemungutan suara. Peneliti mengamati bahwa forum-forum tersebut digunakan tidak hanya untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk mengidentifikasi kendala teknis di

lapangan secara cepat, seperti keterlambatan distribusi logistik ke wilayah pegunungan yang minim akses transportasi. Kondisi ini menunjukkan adanya upaya adaptif KPU Kabupaten Minahasa dalam merespons tantangan geografis, sebagaimana ditekankan oleh Rendy V. J. Suawa bahwa dinamika demokrasi lokal menuntut strategi kelembagaan yang adaptif.

Manajemen logistik pemilu juga menjadi perhatian khusus dalam strategi kelembagaan KPU Kabupaten Minahasa. Berdasarkan hasil wawancara, pendistribusian logistik ke wilayah-wilayah terpencil direncanakan lebih awal dengan mempertimbangkan kondisi cuaca dan aksesibilitas jalan, serta melibatkan koordinasi dengan aparat keamanan dan pemerintah kecamatan untuk memastikan keamanan dan ketepatan waktu distribusi. Hasil observasi lapangan turut mengonfirmasi bahwa proses pengemasan dan pengecekan logistik di gudang KPU Kabupaten Minahasa dilakukan secara berlapis dengan melibatkan saksi dari berbagai pihak, sebagai bentuk transparansi.

Strategi ini sejalan dengan temuan Hermawan (2019) yang menyatakan bahwa strategi penyelenggara pemilu sangat menentukan tingkat partisipasi dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di tingkat lokal, termasuk melalui pengelolaan logistik yang transparan dan akuntabel.

c. Strategi Penguatan SDM dan Respons terhadap Dinamika Politik Lokal

Temuan ketiga dalam penelitian ini berkaitan dengan strategi penguatan sumber daya manusia (SDM) penyelenggara pemilu serta respons KPU Kabupaten Minahasa terhadap dinamika politik lokal. Dalam wawancara, Rendy V. J. Suawa mengungkapkan bahwa,

”...keterbatasan SDM di tingkat kecamatan dan desa menjadi salah satu tantangan utama, sehingga KPU Kabupaten Minahasa secara rutin menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek) bagi anggota PPK dan PPS guna meningkatkan pemahaman mereka terhadap regulasi dan tahapan pemilu. Upaya ini dilakukan agar penyelenggaraan pemilu di tingkat bawah tetap berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, dan profesional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011”.

Hasil observasi terhadap kegiatan bimbingan teknis menunjukkan bahwa materi yang disampaikan mencakup aspek teknis kepemiluan, seperti tata cara pemungutan dan penghitungan suara, serta aspek etika dan netralitas penyelenggara, sebagai upaya membekali petugas ad hoc dengan pemahaman komprehensif sebelum bertugas di lapangan. Peneliti mengamati adanya interaksi aktif antara narasumber dan peserta bimtek, meskipun beberapa peserta dari wilayah pegunungan mengalami kendala terkait akses transportasi menuju lokasi kegiatan. Kondisi ini menegaskan bahwa penguatan kapasitas SDM tidak dapat dilepaskan dari upaya mengatasi hambatan geografis yang menjadi ciri khas Kabupaten Minahasa.

Selain penguatan SDM, hasil wawancara juga mengungkap bahwa KPU Kabupaten Minahasa menerapkan strategi khusus dalam merespons dinamika politik lokal, seperti potensi gesekan antar pendukung calon dan tekanan dari berbagai kepentingan politik. Ketua KPU Kabupaten Minahasa menekankan pentingnya menjaga independensi dan netralitas lembaga melalui komunikasi intensif dengan partai politik, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat guna mencegah potensi konflik. Hasil observasi menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Minahasa secara aktif melibatkan aparat keamanan dalam forum-forum koordinasi menjelang tahapan krusial, seperti kampanye dan pemungutan suara.

Strategi ini sejalan dengan pandangan Hermawan (2019) mengenai pentingnya strategi penyelenggara pemilu dalam membangun kepercayaan publik, sekaligus menunjukkan bahwa penguatan SDM dan mitigasi dinamika politik lokal merupakan dua aspek yang saling berkaitan dalam mewujudkan pemilu yang lancar, damai, dan berkualitas di Kabupaten Minahasa.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa KPU Kabupaten Minahasa menerapkan strategi kelembagaan yang bersifat multidimensional dalam melancarkan Pemilu Tahun 2024, yang mencakup tiga aspek utama, yaitu strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih, strategi koordinasi kelembagaan dan manajemen logistik, serta strategi penguatan sumber daya manusia dan respons terhadap dinamika politik lokal. Sosialisasi dilakukan melalui pendekatan berbasis komunitas dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, pemerintah desa, dan pihak sekolah, meskipun jangkauannya masih menghadapi kendala di wilayah pegunungan yang sulit diakses. Koordinasi kelembagaan dilakukan secara berjenjang mulai dari internal kabupaten hingga badan ad hoc di kecamatan dan desa, didukung oleh manajemen logistik yang direncanakan secara matang dengan mempertimbangkan kondisi geografis. Sementara itu, penguatan SDM melalui bimbingan teknis dan komunikasi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci dalam menjaga netralitas serta mencegah potensi konflik politik lokal.

Secara keseluruhan, strategi yang diterapkan KPU Kabupaten Minahasa menunjukkan adanya upaya adaptif dalam merespons tantangan geografis, sosial, dan politik yang khas di wilayah tersebut, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 mengenai asas mandiri, jujur, adil, dan profesional dalam penyelenggaraan pemilu. Namun demikian, penelitian ini juga mengungkap bahwa efektivitas strategi tersebut belum merata di seluruh wilayah kerja, khususnya pada daerah dengan aksesibilitas geografis yang terbatas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi yang lebih merata dan berkelanjutan, baik dari sisi sosialisasi, koordinasi, maupun penguatan kapasitas SDM, agar penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Minahasa pada periode berikutnya dapat berjalan lebih optimal, inklusif, dan berkualitas.

5. Daftar Pustaka

- Haryono, A. (2019). Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Hermawan, D. (2019). Strategi penyelenggara pemilu dalam meningkatkan partisipasi dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi lokal. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi Revisi)*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, B. (2019). Strategi kelembagaan KPU dalam koordinasi antar divisi dan sekretariat pada penyelenggaraan pemilu daerah. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Pangalila, T., Mesra, R., & Supit, B. F. (2024). Using instructional design to infuse indigenous knowledge in the civic education curriculum. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 45(4), 1185-1194.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Rahman, S. (2022). Literasi politik masyarakat dan pengaruhnya terhadap partisipasi pemilu. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*.
- Rube'i, M., Azwar, A., & Firmansyah, R. (2023). Peran KPU dalam melaksanakan fungsi sosialisasi politik untuk pemilih pemula di Kota Pontianak. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- Zulkarnain, Z., Septia, R., Robing, R., & Ansyari, M. (2023). Peran kelembagaan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula menjelang Pemilu 2024. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*.